



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2025-2026
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke	: 9
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	: Komisi III DPRD Kabupaten Sumedang
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 17 November 2025
Waktu	: Pukul 10.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II Lantai 2 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: Dampak Pemangkasan Kuota Haji Daerah Penyelenggaraan Haji Tahun 1447 H/2026 M
Ketua Rapat	: H. Marwan Dasopang, M.Si.
Sekretaris Rapat	: Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin
Hadir	: 1. 1 dari 42 Anggota Komisi VIII DPR RI; 2. 1 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin; 3. Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Sumedang.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.41 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Marwan Dasopang, M.Si., sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. CATATAN RAPAT

Pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VIII DPR RI dengan Komisi III DPRD Kabupaten Sumedang dengan agenda Dampak Pemangkasan Kuota Haji Daerah Penyelenggaraan Haji Tahun 1447 H/2026 M, dapat dicatat beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI telah mendengarkan penjelasan dari Ketua Komisi III DPRD Sumedang H. Endang Taufiq FR mengenai kuota haji untuk Kabupaten Sumedang yang anjlok dari 824 jemaah pada tahun 1446H/2025M menjadi hanya 72 jemaah pada tahun 1447H/2026M. Mereka sudah melakukan cek kesehatan, mengikuti manasik dan melakukan persiapan keberangkatan sehingga akan melakukan demonstrasi jika tidak bisa diberangkatkan. Ketua DPRD Sumedang mengusulkan kuota haji untuk Kabupaten Sumedang minimal 700 jemaah.
2. Komisi VIII DPR RI sudah menyetujui kebijakan pembagian kuota antarprovinsi dilakukan berdasarkan jumlah daftar tunggu demi menegakkan keadilan. Selama ini pembagian kuota dilakukan berdasarkan jumlah populasi Muslim sedangkan tahun depan akan dilakukan berdasarkan jumlah daftar tunggu. Dengan pendekatan daftar tunggu maka masa tunggu menjadi seragam dan pembagian nilai manfaat juga sama. Namun demikian Komisi VIII DPR RI akan mempertanyakan kepada Menteri Haji dan Umrah RI mengenai sosialisasi yang telah dilakukan sebagai dampak dari perubahan pendekatan dalam pembagian kuota ini.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 11.41 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**

TTD

H. MARWAN DASOPANG, M.Si.